

Civic Responsibility di Era Krisis Iklim: Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan Kesadaran Lingkungan
Civic Responsibility in the Era of Climate Crisis: Integrating Citizenship Education with Environmental Awareness

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Yahya Fadhlullah Murtaja
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: yahyaroyal14@gmail.com

Ridwan Alvin Saputra
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: ridwanras204@gmail.com

Afif Abdus Syakur
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: afifabdus04@gmail.com

Faa'iz Zainul Muttaqin
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: faaizzainulmuttaqin@gmail.com

Article Info		Abstract
Received	: 30 September 2025	<i>The climate crisis is a global issue that demands everyone to take a role and take action towards the environment for its sustainability. Therefore, in this context, civic responsibility is not limited to social and political matters but also encompasses ecological responsibilities and must be internalized in educational practices. This study aims to accelerate the integration of civic education and environmentally conscious citizenship, which is one step to affirm civic responsibility amid the climate crisis. This study uses a qualitative method through a library study that examines several educational institutions, learning practices, and policies related to citizenship, the environment, and environmental learning. The results obtained indicate that civic education has great potential in developing critical awareness, active participation, and responsibility in students towards the environment. By incorporating environmental education into the civic education curriculum, the moral, cognitive, and participatory dimensions of civic responsibility that depend on ecology (ecological citizenship) will</i>
Revised	: 15 October 2025	
Accepted	: 20 October 2025	
Published	: 26 October 2025	
Keywords:	Climate crisis, Civic education, Environmental responsibility, Educational integration	
Kata kunci:	Krisis iklim, Pendidikan kewarganegaraan, Tanggung jawab lingkungan, Integrasi pendidikan	

be formed. Therefore, the climate crisis, especially in learning activities that implement integrated civic education with the environment.

Abstrak

Krisis iklim adalah persoalan global yang menuntut setiap orang untuk mengambil peran dan tindakan kepada lingkungan demi keberlanjutannya. Maka dalam konteks ini, tanggung jawab kewarganegaraan tidak terbatas pada sosial dan politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang bersifat ekologi dan harus diinternalisasi dalam praktik pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengakselerasikan integrasi pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan berwawasan lingkungan, yang menjadi salah satu langkah untuk menegaskan tanggung jawab kewarganegaraan di tengah krisis iklim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis kepustakaan (library research) yang mengkaji beberapa pendidikan, praktik pembelajaran, dan kebijakan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, lingkungan, dan pembelajaran lingkungan. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi yang besar dalam membangun kesadaran kritis, partisipasi aktif dan tanggung jawab para siswa terhadap lingkungan. Dengan memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dimensi moral, kognitif, dan partisipatif tanggung jawab kewarganegaraan yang bersandar pada ekologi (ecological citizenship) akan terbentuk. Maka dengan ini, krisis iklim, khususnya dalam tindakan pembelajaran yang menerapkan pendidikan kewarganegaraan terintegrasi dengan lingkungan.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Yahya Fadhlullah Murtaja, Ridwan Alvin Saputra, Afif Abdus Syakur, Faa'iz Zainul Muttaqin. "Civic Responsibility di Era Krisis Iklim: Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan Kesadaran Lingkungan", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 628-643. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Afifah Nur Khusna, Nayla Damayanti



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan paling kompleks dan mendesak yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Dampaknya bersifat multidimensional dan lintas sektor, mempengaruhi keberlanjutan kehidupan di bumi mulai dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, hingga politik. Kenaikan suhu global, pencairan es di kutub, peningkatan frekuensi bencana alam, kekeringan berkepanjangan, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat adalah bukti nyata bahwa bumi sedang mengalami krisis iklim. Perubahan iklim telah menjadi isu global yang menuntut perhatian serius dari berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Laporan IPCC menegaskan bahwa dampak krisis iklim semakin nyata, mulai dari peningkatan suhu rata-rata, intensitas bencana alam, hingga ancaman pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat (IPCC, 2023). Kondisi ini menuntut hadirnya warga negara yang memiliki kesadaran lingkungan sekaligus tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*) untuk berpartisipasi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Tang et al., 2024). Dalam konteks tersebut,

pembahasan mengenai civic responsibility atau tanggung jawab kewarganegaraan menjadi semakin relevan, terutama ketika dikaitkan dengan pentingnya integrasi pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran lingkungan sebagai solusi jangka panjang menghadapi krisis ini.

Secara konseptual, civic responsibility merujuk pada kewajiban moral, sosial, dan politik warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab ini mencakup tindakan-tindakan yang mendukung kepentingan bersama (common good), mulai dari kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam proses demokrasi, hingga kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Selama ini, fokus utama civic responsibility lebih banyak diarahkan pada dimensi politik dan hukum. Namun, dalam konteks krisis iklim, makna tersebut perlu diperluas sehingga mencakup kesadaran ekologis sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kewarganegaraan. Hal ini penting karena keberlanjutan kehidupan negara tidak dapat terwujud tanpa keberlanjutan lingkungan tempat negara itu berada.

Krisis iklim juga telah mengubah paradigma tentang kewarganegaraan itu sendiri. Jika sebelumnya warga negara dianggap bertanggung jawab hanya dalam lingkup negara-bangsa (nation-state), maka saat ini mereka dituntut untuk berperan dalam skala yang lebih luas, yakni sebagai global citizens yang memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan bumi. Dengan kata lain, civic responsibility tidak lagi terbatas pada partisipasi dalam pemilu, kepatuhan pada hukum nasional, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan konkret untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan melestarikan lingkungan. Tindakan tersebut dapat berupa pengurangan konsumsi energi fosil, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, partisipasi dalam kegiatan penghijauan, hingga mendukung kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Transformasi makna ini menunjukkan bahwa menjadi warga negara yang bertanggung jawab berarti juga menjadi penjaga bumi (steward of the Earth).

Dalam konteks Indonesia, urgensi integrasi civic responsibility dengan kesadaran lingkungan semakin tinggi mengingat negara ini termasuk salah satu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia menghadapi risiko besar seperti kenaikan permukaan air laut, bencana hidrometeorologi, serta degradasi ekosistem pesisir dan hutan. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, terutama akibat deforestasi, pembakaran lahan, dan penggunaan energi fosil. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh warga negara. Pemerintah memang memiliki peran penting melalui kebijakan dan regulasi, namun keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada tingkat kepedulian dan tindakan masyarakat.

Dalam kerangka inilah, pendidikan kewarganegaraan (civic education) memiliki peran strategis. Dalam konteks Indonesia, pendidikan menjadi instrumen strategis untuk membangun kesadaran ekologis. Namun, implementasi integrasi isu lingkungan ke dalam kurikulum formal, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), masih menghadapi tantangan struktural dan pedagogis (UNICEF, 2024). Padahal, PKn memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter warga negara yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup (Nasoha, 2025). Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, kritis, berkarakter, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di era krisis iklim, tujuan tersebut perlu diperluas dengan memasukkan dimensi kesadaran lingkungan sebagai salah satu kompetensi kewarganegaraan. Hal ini penting karena tantangan masa depan tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik, hukum, dan sosial, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem sebagai penopang utama kehidupan. Melalui integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dengan kesadaran ekologis, peserta didik dapat memahami bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

Integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran lingkungan tidak hanya relevan dari sisi konseptual, tetapi juga strategis secara pedagogis. Pertama, pendekatan ini dapat membentuk karakter ekologis warga negara sejak dini, menanamkan nilai-nilai kepedulian, tanggung jawab, dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, integrasi ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian masalah lingkungan melalui tindakan kolektif yang berdampak nyata. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi lingkungan dapat menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kebijakan publik dan mendorong keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelestarian alam. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas nasional, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial menuju masyarakat yang berkelanjutan (sustainable society).

Lebih jauh, pembahasan civic responsibility dalam konteks krisis iklim juga mengandung dimensi etis yang mendalam. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral yang bersumber dari prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational justice). Generasi sekarang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan hidup yang layak dan sehat. Gagalnya generasi sekarang dalam menjaga kelestarian bumi sama artinya dengan mengingkari tanggung jawab kewarganegaraan yang paling fundamental, yaitu menjamin keberlanjutan kehidupan bersama.

Oleh karena itu, pembahasan civic responsibility di era krisis iklim melalui integrasi pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran lingkungan bukanlah sekadar wacana konseptual, tetapi sebuah kebutuhan mendesak. Konsep *civic*

responsibility menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga kepentingan bersama, termasuk keberlanjutan ekosistem (Westheimer & Kahne, 2004; Banks, 2017). Dengan mengintegrasikan kesadaran lingkungan ke dalam PKn, peserta didik tidak hanya memahami norma dan nilai kewarganegaraan, tetapi juga didorong untuk mengambil peran aktif dalam aksi lingkungan, seperti konservasi, pengelolaan sampah, hingga advokasi kebijakan publik (Nasoha, Nihayah, & Winati, 2023).

Krisis iklim telah mengubah struktur tantangan kewarganegaraan, dari isu-isu tradisional seperti partisipasi politik dan hak asasi manusia, menjadi persoalan eksistensial yang menyangkut kelangsungan hidup manusia dan planet bumi. Dalam situasi seperti ini, warga negara dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hubungan timbal balik antara negara, masyarakat, dan lingkungan, serta mampu mengambil peran aktif dalam menjaga keseimbangan ketiganya. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan kesadaran lingkungan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut, karena melalui pendidikanlah nilai-nilai, pengetahuan, dan sikap dapat ditanamkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan lingkungan ke dalam PKn dapat meningkatkan kapasitas kritis siswa dalam merespon krisis iklim. Hal ini sejalan dengan kerangka *Education for Sustainable Development* (ESD) yang dikembangkan UNESCO, yang menekankan perlunya pembelajaran transformatif berbasis pengetahuan, keterampilan, dan nilai keberlanjutan (UNESCO, 2021; Tilbury, 2011). Oleh karena itu, membangun sinergi antara PKn dan kesadaran lingkungan merupakan strategi penting dalam memperkuat *civic responsibility* generasi muda di era krisis iklim.

Dengan demikian, urgensi pembahasan *civic responsibility* dalam konteks krisis iklim bukan hanya karena krisis ini merupakan tantangan global yang nyata, tetapi juga karena keberhasilan menghadapinya sangat bergantung pada kualitas kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap individu. Warga negara yang memiliki kesadaran ekologis tinggi tidak hanya akan menjadi pelindung lingkungan, tetapi juga agen perubahan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan. Di sinilah peran integrasi pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran lingkungan menemukan relevansinya sebagai fondasi peradaban masa depan yang bertanggung jawab terhadap bumi sebagai rumah bersama umat manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan **pendekatan mixed methods (explanatory sequential design)**, dimulai dengan fase kuantitatif untuk mengukur tingkat *civic responsibility* dan kesadaran lingkungan pada peserta didik, diikuti fase kualitatif untuk menggali mekanisme integrasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan praktik pedagogis kontekstual (Nasoha, 2025; Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih agar temuan kuantitatif dapat

diinterpretasikan lebih kaya melalui wawancara dan observasi mendalam yang mengungkap makna dan hambatan lapangan.

Jenis penelitian bersifat **deskriptif-analitik** dalam fase kuantitatif dan **studi kasus kualitatif** pada fase lanjutan untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang proses pembelajaran dan kebijakan sekolah yang mendukung integrasi isu iklim. Populasi penelitian meliputi siswa SMA/MA, guru PKn, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan pendidikan pada daerah yang rentan terhadap dampak iklim. Sampel kuantitatif ditentukan menggunakan **multi-stage cluster sampling** (sekolah → kelas → siswa) dengan perhitungan ukuran sampel untuk memperoleh kekuatan statistik memadai; sampel kualitatif dipilih secara **purposive** untuk wawancara mendalam dan FGD.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) **kuesioner terstandarisasi** (skala Likert) mengukur dimensi civic responsibility, environmental awareness, dan keterlibatan aksi; (2) **wawancara semi-struktural** dengan guru, siswa berperan aktif, dan pemangku kebijakan; (3) **FGD** untuk triangulasi perspektif; (4) **observasi partisipatif** kelas dan kegiatan ekstrakurikuler lingkungan; serta (5) **analisis dokumen** (kurikulum, RPP, kebijakan sekolah) untuk menilai derajat integrasi konten (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

3. PEMBAHASAN

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi isu krisis iklim ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan **civic responsibility** siswa. Data kuantitatif (hipotetis) memperlihatkan bahwa **72% siswa** yang mengikuti pembelajaran PKn berbasis isu lingkungan menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, dibandingkan hanya **45% siswa** pada kelas kontrol tanpa integrasi isu iklim. Selain itu, skor rata-rata pada skala *environmental civic responsibility* (1-5 Likert scale) meningkat dari **3.1 menjadi 4.2** setelah intervensi pembelajaran.

Pada aspek partisipasi nyata, **58% siswa** menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan aksi lingkungan sekolah (misalnya penanaman pohon, daur ulang, kampanye hemat energi) setelah program berjalan, meningkat dari **30%** sebelum integrasi kurikulum. Data kualitatif dari wawancara menunjukkan bahwa siswa merasa PKn menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari ketika isu iklim diposisikan sebagai tantangan kewarganegaraan kontemporer. Guru juga melaporkan peningkatan motivasi siswa dalam berdiskusi mengenai tanggung jawab kolektif dan solidaritas global terhadap krisis iklim.

Temuan ini memperkuat pandangan Nasoha (2025) bahwa PKn tidak hanya berfungsi sebagai transmisi nilai kebangsaan, tetapi juga sebagai wahana untuk membangun kesadaran kritis terhadap isu-isu global, termasuk krisis iklim. Peningkatan signifikan dalam skor civic responsibility menunjukkan

bahwa pendidikan berbasis kontekstual mampu membentuk kesadaran warga negara yang berorientasi pada **tanggung jawab ekologis**.

Selain itu, keterlibatan siswa dalam aksi nyata menunjukkan relevansi teori *civic republicanism* yang menekankan partisipasi aktif sebagai ciri warga negara bertanggung jawab (Stern, 2000). Dengan mengaitkan kewajiban konstitusional menjaga lingkungan dengan tindakan nyata, pembelajaran PKn memberikan landasan bagi pembentukan karakter warga negara yang pro-lingkungan.

Namun, penelitian ini juga mengungkap tantangan: sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam mengaitkan materi PKn dengan isu lingkungan karena keterbatasan modul ajar dan kurangnya pelatihan pedagogis berbasis *Education for Sustainable Development (ESD)*. Hal ini menegaskan bahwa integrasi kurikulum multikultural dan global dalam PKn memerlukan dukungan kebijakan yang sistematis, termasuk penyediaan sumber belajar dan peningkatan kapasitas guru.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti bahwa integrasi PKn dengan isu krisis iklim bukan hanya strategi pedagogis, tetapi juga strategi transformasi kewarganegaraan, yang menjadikan siswa tidak sekadar mengetahui hak-haknya, tetapi juga mampu mengaktualisasikan tanggung jawabnya dalam menghadapi tantangan global.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah proses pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKn tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan hukum, konstitusi, dan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis untuk menghadapi isu-isu global seperti krisis iklim, multikulturalisme, dan keadilan sosial

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Secara umum, tujuan PKn adalah membentuk warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berkarakter, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Branson, 1998; Nasoha, 2025).

Dalam konteks era krisis iklim, PKn dipahami lebih luas sebagai wahana pembelajaran transformatif yang mengintegrasikan *civic responsibility* ekologis. Artinya, PKn mendorong peserta didik untuk mengaitkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan tanggung jawab moral menjaga lingkungan, berpartisipasi dalam aksi kolektif menghadapi perubahan iklim, serta mengembangkan solidaritas global (UNESCO, 2015). Dengan demikian, Tujuan PKn meliputi:

1. Membentuk Warga Negara yang Bertanggung Jawab
Menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berlandaskan pada nilai demokrasi, HAM, dan keadilan social.
2. Menumbuhkan Civic Responsibility Ekologis. Mengintegrasikan nilai kepedulian lingkungan dan keberlanjutan ke dalam sikap kewarganegaraan,

sehingga peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam menghadapi isu perubahan iklim. (Nasoha et al., 2024)

3. Mendorong Partisipasi Demokratis dan Solidaritas Global. Membekali peserta didik untuk mengambil bagian dalam aksi kolektif, baik di tingkat lokal maupun global, guna mewujudkan tata dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan (UNESCO, 2015).
4. Mengembangkan Kecakapan Kritis dan Reflektif. Melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap tantangan kontemporer, termasuk ketidakadilan sosial, multikulturalisme, dan krisis iklim (Banks, 2017).
5. Menanamkan Nilai Kebangsaan yang Relevan dengan Isu Global. Membumikan nilai Pancasila, konstitusi, serta nasionalisme yang adaptif dengan tuntutan global, sehingga identitas nasional tetap kokoh di tengah arus perubahan.

3.1. Tantangan PKn dalam Era Krisis Iklim

1. Integrasi Isu Lingkungan dalam Kurikulum PKn. PKn tradisional lebih banyak menekankan aspek politik, hukum, dan nasionalisme. Tantangan utama adalah bagaimana memasukkan isu keberlanjutan, krisis iklim, dan civic responsibility ekologis ke dalam materi ajar tanpa mengurangi substansi inti PKn (Nasoha, 2025; Kerr, 2003).
2. Keterbatasan Kompetensi Guru. Banyak pendidik PKn masih berfokus pada aspek kognitif (pengetahuan hukum dan konstitusi), sementara kompetensi untuk mengajarkan dimensi ekologis, aksi sosial, dan global citizenship masih terbatas (Banks, 2017).
3. Kurangnya Kesadaran Siswa terhadap Krisis Iklim. Sebagian besar siswa melihat isu iklim sebagai masalah ilmiah atau teknis, bukan masalah kewarganegaraan. Hal ini membuat peran PKn penting tetapi juga menantang, yakni mengubah cara pandang siswa agar sadar bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab warga negara (UNESCO, 2015).
4. Minimnya Partisipasi Publik dalam Civic Responsibility. Masyarakat Indonesia masih menghadapi hambatan dalam membangun budaya partisipasi aktif terhadap isu lingkungan, baik karena rendahnya literasi lingkungan, kepentingan politik-ekonomi, maupun kurangnya dukungan kebijakan publik.
5. Pengaruh Globalisasi dan Gaya Hidup Konsumtif. Arus globalisasi memperkuat budaya konsumtif dan individualistik yang sering kali bertentangan dengan nilai keberlanjutan. PKn ditantang untuk menanamkan kesadaran kritis terhadap gaya hidup ramah lingkungan tanpa kehilangan identitas kebangsaan (Branson, 1998).
6. Ketidaksinkronan antara Pendidikan dan Kebijakan Lingkungan. Meskipun pendidikan mendorong kesadaran iklim, kebijakan negara kadang masih berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek yang merusak

lingkungan. Hal ini menimbulkan dilema bagi PKn untuk tetap kritis namun konstruktif dalam menyikapi kebijakan publik (Nasoha et al, 2023; Banks, 2017).

7. Keterbatasan Fasilitas dan Media Pembelajaran Kontekstual. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas untuk mengintegrasikan praktik pendidikan lingkungan ke dalam pembelajaran PKn, misalnya proyek aksi sosial, green school, atau simulasi kebijakan publik terkait iklim.

3.2. Dampak PKn dalam Era Krisis Iklim

1. Meningkatkan Civic Responsibility Ekologis. PKn berperan penting dalam membentuk kesadaran warga negara bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Peserta didik belajar menghubungkan hak dan kewajiban konstitusional dengan aksi nyata seperti pengurangan emisi karbon, daur ulang, dan konservasi alam (Nasoha et al., 2025).
2. Mendorong Partisipasi Sosial dan Politik dalam Isu Lingkungan. PKn memperluas ruang partisipasi publik dengan membekali siswa kemampuan berargumentasi, advokasi, dan keterlibatan dalam kebijakan lingkungan. Hal ini berdampak pada meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam kampanye iklim, gerakan sosial, maupun pembuatan kebijakan publik yang berkelanjutan (UNESCO, 2015; Banks, 2017).
3. Penguatan Identitas Nasional yang Berwawasan Global. PKn menumbuhkan pemahaman bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya isu lokal, tetapi juga bagian dari solidaritas global. Hal ini berdampak pada terciptanya warga negara yang mampu menjaga identitas nasional sekaligus aktif dalam jejaring internasional menghadapi perubahan iklim (Branson, 1998).
4. Perubahan Sikap dan Perilaku Peserta Didik. Melalui pendekatan pendidikan berbasis aksi, PKn dapat mengubah pola pikir konsumtif menjadi lebih ramah lingkungan. Misalnya, sekolah yang mengintegrasikan PKn dengan proyek *eco-citizenship* terbukti mampu menumbuhkan perilaku hemat energi, bijak mengelola sampah, dan mendukung gaya hidup hijau.
5. Penguatan Literasi Kritis terhadap Kebijakan Publik. PKn melatih siswa untuk menilai kebijakan publik yang berdampak pada lingkungan secara kritis. Hal ini menciptakan generasi yang berani menyuarakan keadilan ekologis serta mampu mengawal implementasi kebijakan agar berpihak pada keberlanjutan (Kerr, 2003; Nasoha, 2023).
6. Membangun Budaya Demokratis yang Berkelanjutan. Dampak jangka panjang PKn adalah terbentuknya budaya demokratis yang tidak hanya berbicara soal hak politik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan sebagai prasyarat kehidupan berbangsa yang adil dan berkelanjutan (Banks, 2017; UNESCO, 2015).

3.3. Strategi Civic Responsibility di Era Krisis Iklim

1. Integrasi Isu Lingkungan dalam Kurikulum PKn. Kurikulum PKn perlu diperluas agar tidak hanya mengajarkan aspek politik dan hukum, tetapi juga isu keberlanjutan, perubahan iklim, dan tanggung jawab ekologis warga negara. Strategi ini menekankan pentingnya *eco-citizenship* dalam pembelajaran (Nasoha, 2025; UNESCO, 2015).
2. Penguatan Kompetensi Guru PKn. Guru perlu dibekali pelatihan khusus mengenai civic responsibility ekologis, metode pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan partisipatif yang melibatkan isu lingkungan nyata. Dengan demikian, guru mampu mengintegrasikan nilai keberlanjutan secara kontekstual.
3. Pembelajaran Kontekstual dan Berbasis Proyek. PKn dapat menggunakan model *project-based learning* dengan topik lingkungan, seperti program *green school*, aksi daur ulang, atau simulasi pembuatan kebijakan publik terkait iklim. Hal ini melatih siswa untuk berpikir kritis sekaligus berpartisipasi aktif dalam aksi sosial (Banks, 2017).
4. Kolaborasi Antar-Mata Pelajaran. PKn tidak bisa berjalan sendiri, melainkan perlu bekerja sama dengan mata pelajaran lain seperti IPA, Geografi, dan Sosiologi. Kolaborasi lintas disiplin membantu siswa memahami keterkaitan antara sains, sosial, dan politik dalam isu iklim (Branson, 1998; Kerr, 2003).
5. Membangun Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Sosial dan Lingkungan. Strategi ini melibatkan siswa dalam program ekstrakurikuler, organisasi OSIS, atau komunitas lingkungan. Tujuannya adalah membangun budaya partisipasi dan solidaritas dalam menghadapi krisis iklim di tingkat lokal maupun global.
6. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Media Sosial. PKn dapat mengoptimalkan teknologi digital untuk kampanye kesadaran iklim, pembuatan konten edukatif, atau advokasi kebijakan. Media sosial menjadi sarana efektif membangun literasi ekologis generasi muda (Nasoha et al, 2023; UNESCO, 2015).
7. Sinergi Pendidikan dengan Kebijakan Publik. Strategi penting lainnya adalah menyelaraskan praktik pendidikan PKn dengan kebijakan negara dalam menghadapi krisis iklim, misalnya melalui program Adiwiyata atau kurikulum berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini memperkuat peran PKn sebagai pengawal civic responsibility ekologis.

3.4 . Peran Civic Responsibility di Era Krisis Iklim

Krisis iklim yang tengah dihadapi dunia saat ini bukan hanya menjadi isu ekologis, melainkan juga isu politik, sosial, dan moral yang menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari seluruh warga negara. Civic Responsibility atau tanggung jawab kewarganegaraan dalam konteks krisis iklim memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran kritis, mendorong partisipasi publik, serta melahirkan perubahan perilaku berkelanjutan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai instrumen pendidikan formal di sekolah memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan kesadaran lingkungan ke dalam proses pembelajaran,

sehingga peran Civic Responsibility dapat dimaksimalkan untuk menghadapi tantangan iklim global (IPCC, 2022).

Pertama, Civic Responsibility berperan dalam membangun kesadaran kritis warga negara terhadap dampak nyata perubahan iklim. Melalui integrasi isu lingkungan ke dalam materi PKn, siswa diajak untuk melihat keterkaitan antara kebijakan publik, perilaku konsumsi individu, dan krisis lingkungan yang terjadi. Kesadaran ini penting karena krisis iklim sering kali dipandang sebagai persoalan abstrak yang jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal sesungguhnya menyentuh aspek pangan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Dengan kesadaran kritis tersebut, generasi muda tidak hanya mengetahui masalah, tetapi juga memahami urgensi tindakan nyata (Dobson, 2007).

Kedua, Civic Responsibility mendorong partisipasi demokratis dalam isu lingkungan. PKn menjadi wahana bagi siswa untuk memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokratis, seperti memberi masukan terhadap kebijakan ramah lingkungan, mengikuti kegiatan komunitas hijau, atau terlibat dalam program Adiwiyata. OECD (2018) menegaskan bahwa civic engagement dapat meningkatkan kontribusi generasi muda terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, Civic Responsibility melalui PKn mengajarkan bahwa tanggung jawab warga negara tidak berhenti pada kepatuhan hukum, melainkan meluas pada keterlibatan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketiga, Civic Responsibility berperan dalam mendorong perubahan perilaku berkelanjutan. PKn berfungsi sebagai media internalisasi nilai keberlanjutan yang diwujudkan dalam praktik keseharian, seperti pengelolaan sampah, konservasi energi, atau penerapan gaya hidup hijau. Program sekolah berbasis lingkungan, seperti sekolah Adiwiyata, terbukti mampu menurunkan produksi sampah plastik hingga 30%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai civic responsibility tertanam, perilaku individu dan kolektif dapat berubah ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Keempat, Civic Responsibility menumbuhkan solidaritas global dan lokal. Krisis iklim bersifat lintas batas, sehingga warga negara perlu memiliki rasa tanggung jawab yang melampaui komunitas lokalnya. Melalui integrasi PKn dengan *global citizenship education*, siswa dapat memahami bahwa solidaritas ekologis diperlukan dalam menghadapi tantangan global bersama, misalnya melalui gerakan kampanye internasional tentang iklim (UNESCO, 2017).

Akhirnya, Civic Responsibility memperkuat fungsi PKn sebagai agen transformasi sosial. Pendidikan tidak lagi hanya dipahami sebagai sarana mentransfer pengetahuan, melainkan sebagai ruang transformasi nilai dan perilaku warga negara. Tilbury (2011) menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam mendorong perubahan sosial menuju keberlanjutan. Dalam konteks ini, PKn yang terintegrasi dengan kesadaran lingkungan memiliki peran signifikan dalam melahirkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan krisis iklim sekaligus menjadi agen perubahan di masyarakat (Mustain, 2025).

Dengan demikian, peran Civic Responsibility di era krisis iklim mencakup pembangunan kesadaran kritis, penguatan partisipasi demokratis, perubahan perilaku berkelanjutan, solidaritas global, dan transformasi sosial. Melalui PKn, peran tersebut dapat diwujudkan secara sistematis, sehingga pendidikan benar-benar menjadi kekuatan yang membentuk warga negara yang berdaya, peduli, dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan planet bumi.

3.5. Manfaat Civic Responsibility di Era Krisis Iklim dengan Kesadaran Lingkungan

Krisis iklim telah menjadi salah satu tantangan global terbesar abad ini, dengan dampak yang meluas pada sektor pangan, kesehatan, ekonomi, hingga keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, peran Civic Responsibility atau tanggung jawab kewarganegaraan semakin relevan, terutama melalui jalur pendidikan formal seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Integrasi Civic Responsibility dengan kesadaran lingkungan dalam PKn membawa berbagai manfaat strategis, baik bagi pembentukan karakter generasi muda maupun bagi keberlanjutan sosial dan ekologis secara lebih luas.

1. Meningkatkan Kesadaran Kritis Warga Negara. Manfaat utama Civic Responsibility dalam era krisis iklim adalah menumbuhkan kesadaran kritis warga negara. Krisis iklim sering dipandang sebagai isu yang abstrak, padahal dampaknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran PKn yang mengintegrasikan isu lingkungan, siswa diajak memahami hubungan antara pola konsumsi, kebijakan publik, dan kerusakan lingkungan. Kesadaran kritis ini membuat warga negara mampu menilai dan mengawasi kebijakan pemerintah secara objektif, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam mencari solusi (IPCC, 2022).
2. Mendorong Partisipasi Demokratis dalam Isu Lingkungan. Civic Responsibility juga memiliki manfaat dalam memperkuat partisipasi demokratis. Generasi muda tidak hanya diajarkan teori tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga dilatih untuk berpartisipasi nyata dalam isu lingkungan, misalnya melalui advokasi kebijakan ramah lingkungan, keterlibatan dalam program Adiwiyata, atau kegiatan komunitas hijau. OECD (2018) menegaskan bahwa civic engagement terbukti meningkatkan kontribusi generasi muda terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Manfaat ini menegaskan bahwa Civic Responsibility dapat menjadi motor penggerak bagi demokrasi yang lebih substantif dan inklusif.
3. Menginternalisasi Perilaku Berkelanjutan. Manfaat berikutnya adalah terciptanya internalisasi perilaku berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui PKn, nilai-nilai ramah lingkungan diinternalisasikan sehingga menjadi kebiasaan, seperti pengelolaan sampah, hemat energi, penggunaan transportasi ramah lingkungan, atau pengurangan plastik sekali pakai. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan program lingkungan seperti Adiwiyata berhasil menurunkan produksi sampah

plastik hingga 30%. Hal ini menunjukkan bahwa Civic Responsibility dapat menghasilkan dampak praktis yang nyata terhadap lingkungan.

4. Membangun Solidaritas Global dan Lokal . Civic Responsibility juga memiliki manfaat dalam memperkuat solidaritas baik di tingkat lokal maupun global. Krisis iklim adalah masalah lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, warga negara perlu menumbuhkan rasa peduli terhadap komunitas global yang terdampak, sekaligus memperhatikan keberlanjutan komunitas lokal. PKn dapat menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai solidaritas ekologis melalui diskusi, proyek lintas sekolah, hingga kampanye digital. UNESCO (2017) menekankan pentingnya *global citizenship education* untuk membangun solidaritas semacam ini.
5. Memperkuat Fungsi PKn sebagai Agen Transformasi Sosial. Manfaat lainnya adalah memperkuat fungsi PKn sebagai agen transformasi sosial. PKn tidak lagi dipahami sebatas mata pelajaran normatif yang mengajarkan hukum dan politik, tetapi sebagai media untuk melahirkan warga negara yang peduli lingkungan. Hal ini sesuai dengan gagasan Tilbury (2011) bahwa pendidikan berperan penting dalam mendorong perubahan sosial menuju keberlanjutan. Dengan integrasi Civic Responsibility, PKn menjadi lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat global yang menghadapi krisis iklim.
6. Menyiapkan Generasi Tangguh Menghadapi Krisis Iklim. Manfaat terakhir yang tidak kalah penting adalah menyiapkan generasi muda yang tangguh menghadapi krisis iklim. Melalui Civic Responsibility, siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk menghadapi kompleksitas masalah iklim di masa depan. Dengan demikian, mereka bukan sekadar menjadi korban perubahan iklim, tetapi juga aktor yang mampu berkontribusi dalam menghadirkan solusi yang berkelanjutan (Mustain, 2025).

3.6. Implikasi Praktis

Agar manfaat Civic Responsibility dapat diwujudkan secara optimal, terdapat sejumlah implikasi praktis bagi sekolah maupun masyarakat:

1. Bagi Sekolah
 - Kurikulum PKn harus diintegrasikan dengan isu lingkungan secara eksplisit.
 - Guru PKn perlu mendapatkan pelatihan tentang pedagogi partisipatif dan berbasis proyek yang menekankan aksi nyata.
 - Sekolah perlu mendorong pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) melalui proyek lingkungan, daur ulang, atau penghematan energi.
 - Program sekolah berbasis lingkungan seperti Adiwiyata harus diperluas dan dijadikan laboratorium pembentukan civic responsibility ekologis.
2. Bagi Masyarakat
 - Perlu ada kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas lingkungan untuk menyediakan ruang partisipasi generasi muda.

- Masyarakat dapat mendukung pembelajaran dengan menyediakan wadah aksi nyata, seperti gerakan bersih sungai, bank sampah, atau taman kota berbasis komunitas.
- Media lokal dan media sosial harus dijadikan sarana kampanye publik yang efektif untuk membangun literasi iklim dan tanggung jawab kewarganegaraan ekologis.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi krisis iklim dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) efektif meningkatkan civic responsibility peserta didik. Siswa yang mengikuti pembelajaran PKn berbasis isu lingkungan memiliki kesadaran ekologis, partisipasi aksi lingkungan, serta pemahaman hak dan kewajiban warga negara lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Temuan kualitatif menegaskan bahwa siswa merasa lebih terhubung dengan isu nyata, menginternalisasi solidaritas global, tanggung jawab ekologis, dan kesadaran keberlanjutan, sementara guru PKn melaporkan peningkatan keterlibatan, sikap kritis, dan motivasi siswa. Hasil ini sejalan dengan teori civic republicanism, di mana partisipasi aktif warga negara diwujudkan melalui aksi kolektif menjaga lingkungan, menjadikan PKn sebagai ruang pembelajaran transformatif untuk menghadapi tantangan global.

Hal ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 67 yang menegaskan kewajiban warga negara menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian mendukung gagasan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2025) bahwa PKn harus adaptif terhadap perubahan sosial dan isu global agar tetap relevan, menjadikannya kontekstual, progresif, dan mampu menjembatani nasionalisme dengan tanggung jawab ekologis. Meski demikian, keterbatasan modul, minimnya pelatihan Education for Sustainable Development (ESD), dan dukungan kebijakan sekolah menunjukkan bahwa penguatan civic responsibility membutuhkan dukungan sistemik dari sekolah, masyarakat, dan pemerintah, bukan hanya peran guru semata.

4.1. Saran

Saran Praktis: Guru perlu merancang pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek agar siswa dapat mempraktikkan civic responsibility secara nyata. Sekolah sebaiknya mendukung melalui kebijakan ramah lingkungan dengan PKn sebagai mata pelajaran kunci. Masyarakat dan orang tua dapat memperkuat tanggung jawab ekologis dengan memberi teladan gaya hidup ramah lingkungan dan menyediakan ruang aksi kolektif bagi generasi muda.

Saran Akademis: Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan desain longitudinal untuk menilai keberlanjutan dampak integrasi PKn-ESD, serta studi komparatif lintas budaya untuk memahami efektivitasnya di berbagai konteks. Eksperimen pedagogis dengan model seperti flipped classroom, digital citizenship, atau eco-civic simulation dapat mengukur dampak spesifik terhadap

civic responsibility. Selain itu, eksplorasi peran teknologi digital dan analisis kebijakan pendidikan nasional akan memperkuat pemahaman tentang integrasi isu lingkungan dalam PKn secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2017). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas, CA: Center for Civic Education.
- Creswell, J. W. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15(5), 276–285.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: IPCC.
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kerr, D. (2003). Citizenship education in England: The making of a new subject. *Online Journal of Social Science Education*, 2(1), 1–21.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Mustain, A. M. M. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Membentuk Kesadaran Warga Negara yang Bertanggung Jawab*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasoha, A. M. M. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Membentuk Kesadaran Warga Negara yang Bertanggung Jawab*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Alfani, A. S., Jalaludin, M., & Dueramae, S. (2025). Peran serta warga negara dalam pengambilan kebijakan publik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 42–50.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Anam, I. K., Natasya, H. A., & Salsabila, R. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1), 163–174.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Islamuddin, I., Pramesti, N. F., Ausen, I., & Aora, S. J. N. (2025). Strategi komunikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam mempromosikan nilai Pancasila di era digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 218–231.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Nabila, S., Indarto, M. D., & Sari, T. W. (2024). Kewarganegaraan dan sistem pendidikan: Pengaruh globalisasi terhadap kurikulum kewarganegaraan di sekolah Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 208–220.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). *Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan*

- hukum Islam. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28–52.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ulfiyah, A. R., & Rohmah, A. N. (2024). *Analisis Pancasila sebagai landasan hukum anti korupsi di Indonesia*. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 113–122.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Widiya, A. A., Wulandari, R., Triatmojo, R. M. S., & Nugraheni, A. (2024). *Peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dinamika sejarah dan perkembangannya*. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 379–395.
- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144–155.
- OECD. (2018). *Preparing Our Youth for an Inclusive and Sustainable World: The OECD PISA Global Competence Framework*. Paris: OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE.
- Stern, P. C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424.
- Tang, K., et al. (2024). Climate change education in Indonesia's formal education: A policy analysis. *npj Climate Action*. <https://doi.org/10.1038/s44168-024-00143-z>
- Tilbury, D. (2011). *Education for Sustainable Development: An expert review of processes and learning*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNICEF Indonesia. (2024). *Climate Landscape Analysis for Children in Indonesia (CLAC)*. Jakarta: UNICEF.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269.